



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIESJE SILTJE SAMBOW
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 480262

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 518.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/250 m2 di KOTA MINAHASA, WARISAN Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1950 m2/100 m2 di MINAHASA UTARA, WARISAN Rp. 168.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KOTA MANADO , WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KOTA MINAHASA, WARISAN Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KOTA MINAHASA, WARISAN Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 60.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 579.600.000

III. HUTANG

Rp. 160.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 419.600.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.